

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi merupakan sistem yang dianut oleh negara Indonesia yang di dalamnya terdapat berbagai partai politik. Dimana partai politik ini memiliki ideologi ataupun landasan dalam bergerak untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam tipologi perkembangan partai politik di negara demokrasi, adanya pengklasifikasian partai politik dengan berdasarkan kriteria, seperti asas dan orientasi serta basis sosial dan tujuan partai politik. Sehingga partai politik dapat leluasa menentukan arah gerak dalam mencapai tujuan yang telah disepakati.

Sistem kerja demokrasi memiliki prinsip demi kemaslahatan bersama. Dalam kasus negara demokrasi, konsep negara hukum juga menjadi landasan kuat untuk mempertahankan kesetaraan demi terciptanya kemaslahatan, asas negara hukum inilah yang mandarah daging dalam tubuh negara Indonesia hingga sekarang (Akbar, 2016). Hal ini sangat relevan untuk menjadi suatu alasan yang logis dari negara demokrasi. Dimana dalam negara demokrasi, hukum dijadikan sebagai salah satu asas yang di pegang teguh dalam kerja-kerja demokrasi itu sendiri.

Indonesia telah tegas menyatakan jika negara ini menganut sistem demokrasi, dimana kekuasaan seluruhnya berada di tangan rakyat. Menurut Abraham Lincoln menyebutkan jika demokrasi ialah suatu pemerintahan "*Dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat*". Maka dari itu, sebagai negara demokrasi ketetapan dan aturan harus di tegakan.

Seperti halnya ketika penerapan hukum klasik pada abad ke-19 yang menyebutkan jika suatu negara ingin menyelenggarakan hak politik secara efektif, harus dapat membatasi kekuasaan pemerintah dengan adanya konstitusi baik bersifat tulisan (*Written Consitution*) maupun tidak dalam bentuk tulisan (*Unwritten Constitution*) (Patawari, 2017).

Dalam buku yang berjudul *An Introduction to Democratic Theory* yang di tulis oleh Henry B. Mayo yang dikutip oleh Dadan Supardan (2015) ia menyebutkan jika “*Sistem politik yang demokratis adalah suatu kebijaksanaan yang bersifat umum dapat ditentukan atas dasar kuantitas/mayoritas oleh wakilnya yang di awasi secara efektif oleh rakyat di dalam pemilihan yang disandarkan atas prinsip kesatuan politik dan dilaksanakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik*” (Supardan, 2015). Selain dari pada itu, demokrasi juga tidak hanya menjadi suatu sistem pemerintahan, namun menjadikan suatu gaya hidup masyarakat tertentu karena mengandung unsur-unsur moralitas yang tinggi.

Hak politik merupakan suatu hak asasi manusia yang harus di junjung tinggi, sebagaimana diatur dalam pasal 23 (1) UU No. 39 Tahun 1999 “*Setiap orang memiliki kebebasan untuk memilih dan memiliki keyakinan politiknya sendiri.*” Dan pasal 24 (1) dan (2) UU No. 39 Tahun 1999 “*Bahwa setiap orang berhak untuk berkumpul, berpendapat, dan berserikat dengan maksud yang damai,*” dan Ayat (2) “*Jika setiap warga negara atau kelompok masyarakat memiliki kebebasan untuk mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lain dalam berperan serta untuk menjalankan pemerintahan dan penyelenggaraan negara yang sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan undang-undang.*” Dengan kata lain, setiap orang bebas memilih keyakinan dalam politiknya, jika kita kaitkan dengan ekspresi suatu keyakinan dalam beragama atau di dasarkan pada agama tertentu.

Dalam praktinya, partai politik memiliki peran dan posisi serta kekuatan yang sangat besar dalam ranah pemerintahan hingga kebijakan yang mengaitkan warga negara. Bahkan bisa di katakan jika yang memainkan roda demokrasi ialah partai politik itu sendiri, sebagaimana yang di sebutkan oleh Schattscheider (1942) yang di kutip oleh Jimly Asshiddiqie bahwa “*Political Parties Created Democracy*” (Jimly, 2009).

Secara tidak langsung hal ini menjadi legasi bahwa partai politik memegang peran penting dalam negara demokrasi, baik partai nasionalis maupun partai islam.

Indonesia merupakan suatu negara dengan tingkatan mayoritas muslim terbanyak dan terbesar di dunia dengan presentase 86.07% masyarakat penganut agama islam dan ini merupakan suatu kenyataan yang dapat di buktikan oleh fakta demografis sosiologis-teologis yang tidak dapat di bantah (Annur, 2023). Bicara soal islam juga seharusnya kita dapat melihat secara eksplisit, yang tertera dalam QS Al-Anbiya (107) jika islam merupakan agama bagi alam semesta "*Rahmatan lil'alam*" yang memiliki makna bahwa islam Rahmat seluruh makhluk, menebarkan keadilan dan kedamaian serta kebijaksanaan. Dengan demikian islam yang seharusnya menciptakan ruang-ruang kondusif bagi sesamanya, dengan kata lain islam merupakan agama yang membawa keberkahan bagi seksama terutama dalam memperjuangkan cita-cita mulia dalam berpolitik.

Dengan demikian, seharusnya menjadi lahan basah bagi partai kebangkitan bangsa selaku partai politik yang memiliki basis islam untuk menaikan elektabilitas dan meraup suara masyarakat secara maksimal. Namun pada kenyataanya masih banyak masyarakat muslim memilih untuk memberikan kepercayaan politiknya terhadap partai lainnya, sehingga partai politik berbasis islam tersebut tidak mencapai harapan yang di inginkan secara maksimal (Riyanto, 2020).

Dewasa ini kita sering mendengar jika adanya perbedaan pendapat mengenai hubungan politik dengan agama, baik secara substantif maupun formalistik, menurut (Madjid, 2002) menyebutkan jika jumbuh para ulama telah mengambil kesimpulan jika pemisahan antara agama dan politik ada suatu ketidakmungkinan. Maka dari itu, sebagai warga negara dan sekaligus beragama muslim harus memiliki kontribusi lebih dalam memaknai kerja-kerja politik dengan cara yang sudah di tetapkan.

Seperti yang sudah di tuliskan, jika partai kebangkitan bangsa selaku partai politik berbasis islam masih belum mampu mencapai puncak kejayaan seperti yang di cita-citakan. Jika menurut Zainal Abidin Amir (2003) nasib umat Islam Indonesia hingga saat ini masih berlawanan dengan jumlah mayoritas masyarakat islam yang menempati urutan teratas di tengah-tengah penduduk Indonesia yang sangat melimpah.

Jika dilihat dari perspektif politik secara praktis, sebagaimana di kemukakan oleh Faisal Ismail (2002) yang menyebutkan jika alur dari realitas aspirasi politik masyarakat Islam pada dataran empirik di pentas politik regional maupun nasional tidak selamanya dapat terkonsentrasi dan menyatu padu dalam satu wadah partai Islam maupun partai yang berbasis Islam. Hal ini menjadi alasan, mengapa jumlah penduduk indonesia dan aspirasi politik masyarakatnya yang mayoritas Islam tidak selaras.

Seperti yang dikatakan oleh Steven Fish seorang pakar politik islam dari UCLA (*University California of Los Angles*) yang dikutip oleh Azyumardi Azra (2013) menyebutkan jika partai politik islam atau partai politik berbasis islam di Indonesia memiliki tujuan yang sama dan serupa. Namun, saat ini belum mampu menunjukkan eksistensi dan keistimewaan masing-masing. Maka dari itu, partai politik berbasis islam belum mampu bersaing dengan partai lainnya.

Partai kebangkitan bangsa belum menemukan jati dirinya dalam persaingan dengan partai politik lainnya. Pada pemilihan legislatif tahun 2019, PDIP menjadi partai terbesar dalam perolehan suara yang dibuktikan dengan data dan di susul oleh Gerindra dan Golkar. Sebaran kekuatan politiknya sangat massif, mulai dari partai petahana dan kekuatan sumber finansial juga besar menjadikan tatanan masyarakat sosial kalangan bawah hingga atas bisa di amankan dengan suatu narasi dan data yang sudah dilakukan selama menjabat (Al Sukri, 2022).

Dalam hasil rekapitulasi pemilihan legislatif tingkat nasional yang secara sah dikeluarkan oleh KPU, Partai Kebangkitan Bangsa hanya mampu bertengger di posisi ke-4 pada pileg 2019, seperti yang di tunjukan pada gambar 1.1 di bawah ini.



Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Gambar 1. 1 Hasil Rekapitulasi Pemilihan Legislatif DPR RI Tahun 2019.

Dari gambar diatas kita bisa lihat bersama jika PKB belum bisa menjadi partai yang besar jika dibandingkan dengan partai lainnya. Padahal Partai Kebangkitan Bangsa memiliki basis di beberapa daerah muslim Indonesia, namun hanya sedikit wilayah tersebut yang dapat di kuasai oleh partai politik tersebut, yang artinya bahwa partai politik berbasis islam tersebut tidak mendapatkan hasil maksimal dan tidak mencapai target di berbagai daerah.

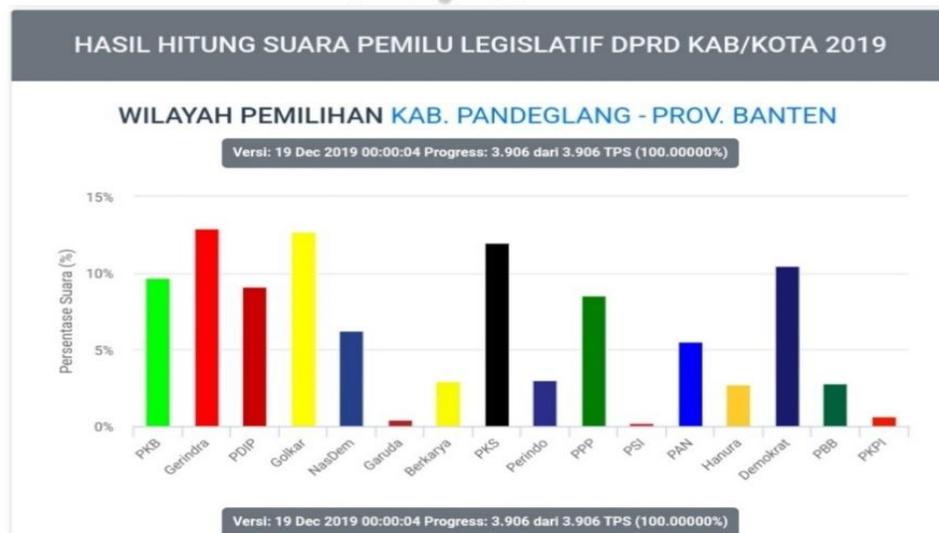
Dengan data yang di temukan pada tahun 2019, pemilu tahun tersebut tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) di kabupaten pandeglang untuk Pemilu 2019 di daerah itu sebanyak 899.811 jiwa dan Partai Kebangkitan Bangsa di kabupaten pandeglang bertengger di posisi ke-5 di bawah partai besar lainnya seperti Gerindra, Golkar, PKS dan Demokrat. Adapun perolehan suara dan kursi tersebar di 6 dapil yang di dasarkan pada Jumlah DPT tahun 2019 sebagai berikut:

Nama Partai	Jumlah Suara	Presentase	Jumlah Kursi
Gerindra	86.520 Suara	12,94%	7 Kursi
Golkar	85.515 Suara	12,79%	7 kursi
PKS	80.384 Suara	12,02%	6 Kursi
Demokrat	70.916 Suara	10,06%	6 Kursi
PKB	64.488 Suara	9,64%	6 Kursi
PDIP	60.730 Suara	9,08%	5 Kursi

Sumber: KPU Pandeglang.

Tabel 1. 1 Perolehan Suara dan Kursi DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun 2019

Di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten dengan mayoritas muslim terbesar, hingga mencapai presentase 99,84% jumlah penduduk beragama islam. Menurut (Kusnandar, 2022) seharusnya menjadikan partai politik berbasis islam (PKB) dapat berkembang pesat secara menyeluruh di wilayah tersebut. Pada kenyataanya, kekuatan partai politik berbasis islam belum mampu bersaing dengan partai politik nasionalis. Dalam hasil rekapitulasi hasil pemilihan legislatif tahun 2019 di kabupaten pandeglang, seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.2 dibawah ini.



Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Gambar 1. 2 Hasil Rekapitulasi Pemilihan Legislatif DPRD Kab Pandeglang Tahun 2019.

Peran Partai Kebangkitan Bangsa dalam memanjakan masyarakat dengan kebijakan dan programnya belum berhasil menciptakan

kepercayaan rakyat terhadap partai berbasis islam tersebut. Jika di lihat dari sejarahnya, partai kebangkitan bangsa memiliki basis yang besar dari kalangan Nahdlatul Ulama yang kerap kali memerankan strategi penokohan melalui jalur ulama dan santri. (Yugha, 2014).

Peranan tokoh politik yang terlibat pada pemilu tahun 2019 seperti Jokowi dan Prabowo yang berasal dari partai nasionalis, merupakan salah satu faktor partai kebangkitan bangsa tidak memiliki kharismatik dalam penokohan dan gagasan yang dibawakan. Dimana sosok politisi yang terlibat lebih menekankan pada aspek nasionalisme dengan merujuk dan menyelaraskan nilai-nilai nasionalisme dalam Pancasila. Sehingga masyarakat memiliki titik fokus pada sosok penokohan tersebut dan mengabaikan pertarungan partai di parlemen.

Selain itu, dalam sebaran budaya politik yang berkembang di masyarakat yang beragam, budaya kedaerahan yang kental masih dipegang dengan kuat. Di mana budaya politik umat muslim di Kabupaten Pandeglang masih rendah dengan kalimat "*Ta'dzim*" atau penghormatan terhadap Ulama, selain itu banyak masyarakat yang ketinggalan zaman disebabkan oleh isolasi dari kebudayaan luar. Dengan seiring berjalannya waktu, peran penokohan ini luntur dan berimbas pada kekuatan partai politik berbasis islam.

Partai Kebangkitan Bangsa selaku partai berbasis islam merupakan partai yang hampir sama dengan partai islam, namun secara penggunaan asas dan ideologinya berbeda. Partai politik berbasis islam ialah partai politik yang memiliki asas Pancasila, namun secara gagasan dan basis terkuatnya berasal dari titah dan ajaran islam serta semangat perjuangannya selaras dengan perjuangan islam. Pancasila merupakan lima nilai yang fundamental suatu sebagai konsepsi tentang dasar negara indonesia, di dalamnya terdapat pandangan hidup serta ideologi kenegaraan bangsa Indonesia.

Setiap negara maupun bangsa harus memiliki suatu konsepsi yang menyangkut pada nilai-nilai dasar bagi keberlangsungan, keutuhan dan kemajuan bangsa yang bersangkutan. Menurut John Garden (1992) menyebutkan jika *“Tidak ada satupun bangsa yang dapat mencapai kebesaran jika bangsa tersebut tidak percaya terhadap sesuatu, dan jika suatu yang di percayainya tidak memiliki dimensi moral yang dapat menopang peradaban besar”*.

Dengan adanya Pancasila yang menjadi konsep moralitas untuk membumikan nilainya dalam keseharian dan dapat menopang peradaban besar, maka secara sah bahwa Indonesia mempercayai dan meyakini bahwa Pancasila sebagai falsafah negara, guna untuk menjadikan dasar dalam segala hal yang menyangkutpautkan dengan proses kenegaraan (Latif, 2017).

Dengan demikian, partai kebangkitan bangsa merupakan partai yang mencoba untuk mengkorelasikan nilai-nilai Pancasila dan keislaman, guna menciptakan nilai yang lebih banyak memberikan manfaat untuk masyarakat dari kebijakan dan lainnya. Secara tidak langsung partai politik nasionalis yang berbasis islam merupakan partai yang moderat (*Pertengahan*), dimana partai ini memposisikan dirinya sebagai partai pancasilais dan agamis.

PKB (*Partai Kebangkitan Bangsa*) yang merupakan partai berbasis islam, dimana basis utama partai tersebut berasal dari warga muslim yang berafiliasi dengan organisasi masyarakat seperti Nahdlatul Ulama. Secara jelas bahwa ideologi partai politik ini ialah Pancasila dengan menerapkan moralitas keislaman di dalamnya (Yugha, 2014).

Dalam teori partai politik yang di kemukakan oleh Sigmund Neumann (1956) berpendapat bahwa Partai Politik adalah suatu perkumpulan/organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha dan mencoba untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan dan partisipasi rakyat melalui persaingan dengan golongan-golongan yang mempunyai pandangan politik yang berbeda.

Partai Kebangkitan Bangsa belum mampu beradaptasi untuk melakukan strategi dan kerja-kerja partai, sehingga peran partai belum membangunkan marwah dan martabat partai politik berbasis islam di kabupaten Pandeglang. Karena terhitung semenjak masa reformasi, partai kebangkitan bangsa tidak mampu menjadi partai politik pemenang pemilihan legislatif di kabupaten pandeglang.

Lalu mengapa hal tersebut terjadi, padahal ketika melihat mayoritas penduduk masyarakat beragama islam namun secara kepercayaan politik belum bisa menghibahkan kepercayaanya terhadap partai kebangkitan bangsa. Pada tahun 2019 bisa kita lihat bersama, jika partai kebangkitan bangsa belum mampu bertengger di posisi puncak, saat ini di pegang oleh tiga partai pemenang pileg 2019 di kabupaten pandeglang, diantaranya Gerindra, Golkar dan PKS.

Dengan melihat fenomena tersebut, maka dari itu penulis terketuk untuk meneliti lebih jauh mengapa hal demikian bisa terjadi, terlebih penelitian ini akan di kaji di daerah mayoritas muslim dan konon katanya menjadi daerah dengan julukan kota santri. Namun seperti pemaparan di atas, yang menyebutkan jika masyarakat pandeglang belum sepenuhnya percaya terhadap partai kebangkitan bangsa dalam kancan keterwakilannya di parlemen, sehingga hal tersebut memicu menurunnya kekuatan partai dalam beberapa sektor, baik dalam menjalankan fungsi-fungsi partai dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam dunia pemerintahan.

Dengan maksud demikian, maka judul yang akan peneliti tulis dalam menyusun dan menjawab permasalahan yang ada di dalamnya, penulis sajikan dengan judul **“Kekuatan Politik Partai Kebangkitan Bangsa di Daerah Mayoritas Muslim pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 (Studi Kasus Kabupaten Pandeglang).”**

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah yang didapatkan ialah:

1. Terdapat beberapa keanehan dan ketidaksesuaian dari suatu harapan dan realita yang ada. Dimana masyarakat pandeglang dengan persentase 99,84% mayoritas muslim dan penduduk muslim terbesar di provinsi banten, belum memihak terhadap PKB yang merupakan partai politik berbasis islam di daerah pada pemilihan legislatif tahun 2019.
2. Kekuatan politik partai kebangkitan bangsa dipertanyakan dalam meraup partisipasi masyarakat muslim, secara tidak langsung hal tersebut seharusnya menjadi lahan basah untuk di garap dalam persebaran strategi marketing politik terhadap masyarakat muslim, tapi nyatanya masyarakat lebih tertarik dan memilih partai politik lainnya yang menurutnya lebih baik dan menjanjikan dalam ranah kebijakan dan lainnya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang yang sudah di paparkan, maka permasalahan yang akan di bahas dalam dalam penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan politik partai kebangkitan bangsa di Kabupaten Pandeglang pada pemilihan legislatif tahun 2019?
2. Apa faktor yang mempengaruhi kekuatan/melemahnya partai kebangkitan bangsa di Kabupaten Pandeglang tahun 2019?

D. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, ada beberapa tujuan penelitian yang ingin di capai oleh penulis diantaranya:

1. Untuk mengetahui kekuatan politik partai kebangkitan bangsa di kabupaten pandeglang.

2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kekuatan dan melemahnya partai kebangkitan bangsa di kabupaten pandeglang.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam melaksanakan penelitian ini sebagai berikut:

1. Penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang dan kajian politik islam, khususnya pada kajian partai politik berbasis islam. Terlebih penulis merupakan mahasiswa yang lahir di Kab. Pandeglang, sehingga bisa mengetahui pandeglang dari berbagai sudut bukan hanya sebatas wilayah dan daerah yang sangat kaya dan indah saja (*Sosial dan Budaya*) melainkan dari sudut lainnya seperti politik dan pemerintahan.

2. Jurusan, Fakultas dan Universitas

Memberikan pemikiran peneliti dan menambah literatur dengan kajian dan penyajian yang baru, sebab baru kali ini ada penelitian dengan objek kajian partai politik berbasis islam kedaerahan yakni mengangkat pada Kab. Pandeglang sebagai lokus utama.

3. Masyarakat Umum (Akademisi, Praktisi, Pelajar dan lainnya)

Sebagai bahan kajian keilmuan dan wawasan pengetahuan terutama dalam dalam segi politik islam dan di korelasikan pada persoalan partai politik secara umum. Dan menjadi pertanyaan secara luas bagi Indonesia sebagai masyarakat mayoritas islam, tapi nyatanya partai politik berbasis islam kurang disegani dan mendapatkan kepercayaan secara penuh dari penduduk Indonesia.

F. Batasan Penelitian

Partai islam dan partai nasionalis yang berbasis islam di Indonesia tergolong banyak, diantaranya (PKS, PBB, PPP dan PKB, PAN). Namun dalam Penelitian ini, penulis mencoba meneliti salah satu partai politik

nasionalis yang berbasis islam dalam cakupan kekuatan partai politik. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merupakan partai politik berbasis islam dengan penerapan asas/ideologi Pancasila. PKB merupakan partai yang ikut bersaing pada pemilihan legislatif pada tahun 2019, dimana mayoritas Masyarakat kabupaten pandeglang beragama muslim.

Nahdlatul Ulama berkembang secara pesat dalam menggabungkan aspek tradisional dan modernitas sehingga warga nahdlatul ulama menjadi lebih terbuka dalam pada saat ini. Pada tahun 1998 Nahdlatul Ulama menginisiasikan suatu partai politik (PKB) untuk menjembatani warga Nahdliyin dalam proses pemerintahan, sehingga seharusnya Masyarakat muslim dapat berpartisipasi dalam pemilihan legislatif untuk mempercayai sebagai bentuk representasi warga nahdliyin terhadap partai kebangkitan bangsa.

G. Kerangka Pemikiran

Partai politik merupakan salah satu infrastruktur politik. Dimana infrastruktur politik di Indonesia meliputi seluruh kebutuhan yang di perlukan dalam bingkai politik untuk melaksanakan tugas-tugas dan bentuk proses pemerintahan. Hal ini juga bisa dikaji dengan melihat faktor lainnya termasuk suatu organisasi dan sistem yang ada. Oleh karena itu, suatu organisasi yang resmi tampak sama dengan partai politik, seperti perkumpulan tani, buruh, pemuda, pedagang, pelajar dan lainnya. dalam Teori Hegemoni yang dikemukakan oleh Antonio Gramsci menyebutkan ada juga suatu organisasi yang abstrak namun dapat menguasai keadaan sebagai *elite power* atau *pressure group* seperti kelompok yang fanatik terhadap sesuatu yang terkumpul dalam satu almamater.

Partai politik mendapatkan kesempatan dengan melihat kondisi seperti itu, dengan melakukan pendekatan secara personal maupun kelompok untuk dapat masuk ke pemikiran mereka dan mulai melakukan pengaruh partai politiknya. Pada akhirnya suatu kelompok organisasi tersebut mendukung partai politik dengan ranionalisasi yang jelas, mereka

dapat membentuk suatu gerakan yang sifatnya personal maupun kelompok untuk mendukung partai politik, dengan demikian kekuatan partai politik itu tumbuh dan berkembang meluas ke tataran masyarakat di suatu wilayah. (Romli, 2011).

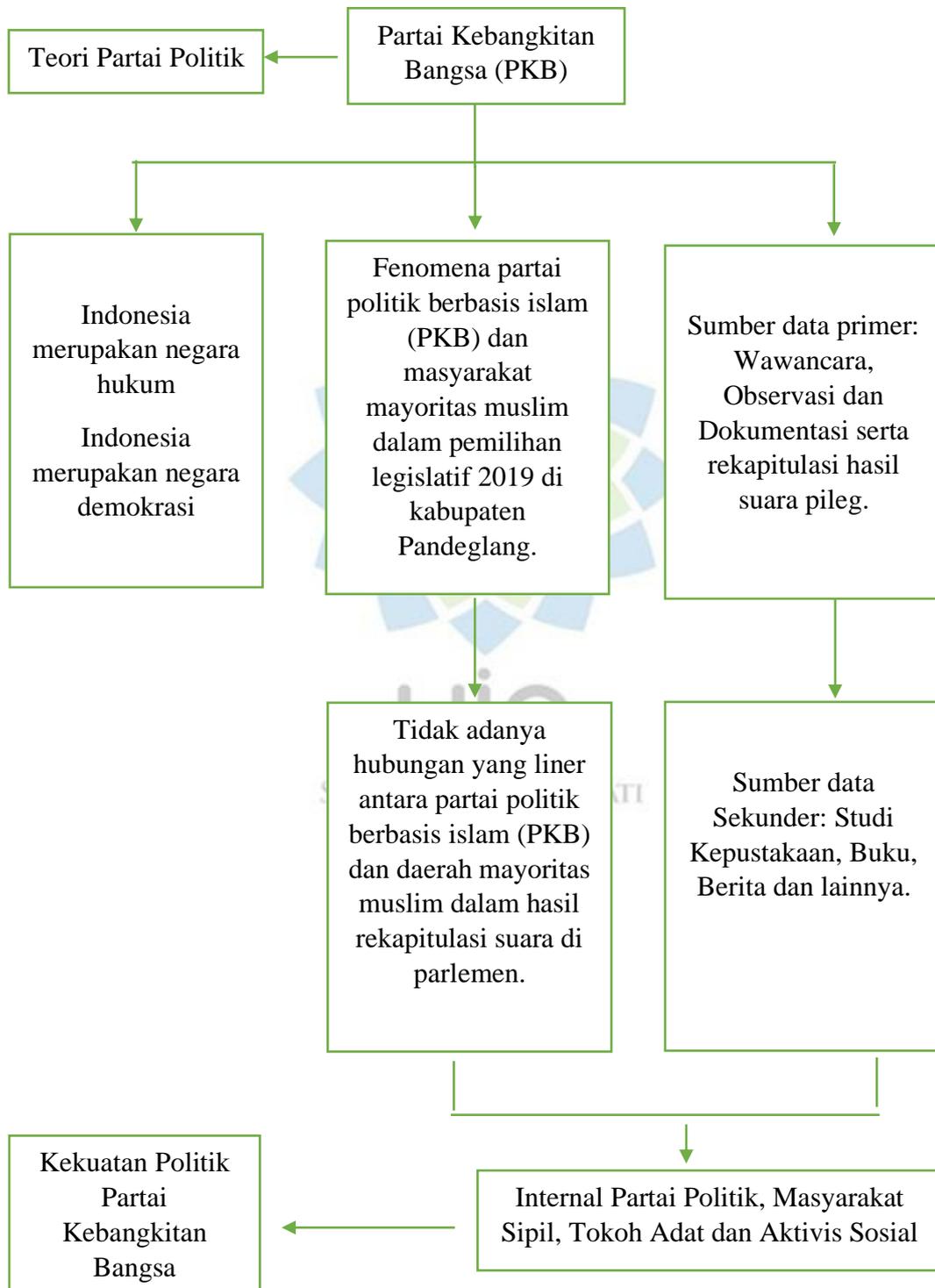
Dalam ranah politik, masyarakat di berikan pilihan politik sepenuhnya yang tertuang dalam UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 23 (1) dan 24 (1) dan (2). Masyarakat di bebaskan untuk membentuk organisasi ataupun perkumpulan asalkan tidak bertentangan dengan dasar negara Indonesia. Dengan demikian, suatu identitas politik itu tercipta dengan sendirinya sesuai dengan keinginan/tujuan suatu organisasi maupun kelompok.

Sigmund Neumann (1956) berpendapat bahwa teori Partai Politik adalah suatu perkumpulan/organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha dan mencoba untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan dan partisipasi rakyat melalui persaingan dengan golongan-golongan yang mempunyai pandangan politik yang berbeda

Menurut Wicipto Setiadi (2012) Kekuatan politik partai dapat menjadi besar dengan melakukan sebaran pada 3 level, yaitu level akar rumput, level pusat dan level pemerintahan. Pada level akar rumput, partai politik harus siap dan mampu menghadapi masyarakat lokal, pendukung serta pemilih. Pada level pusat, partai politik harus menghadapi sebaran dalam ranah nasional, partai politik lain dan elite lainnya. Sedangkan pada level pemerintahan, partai politik menghadapi pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif.

Dengan demikian kekuatan partai politik akan tercipta jika seluruh elemen dapat di gerakan oleh partai baik secara internal maupun eksternal partai politik. Pencapaian terpenting dalam menguatkan kekuatan partai adalah kekuasaan yang di dapatkan baik dalam ranah eksekutif maupun legislatif, sesuai dengan teori partai politik yang di kemukakan oleh Sigmund Neumann. Berdasarkan pemaparan di tersebut, maka dapat

dirumuskan suatu kerangka pemikiran yang melandasi penelitian ini, ialah sebagai berikut:



Gambar 1. 3 Kerangka Pemikiran.